

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Pesantren muadalah di Indonesia merupakan perjalanan panjang ikhtiar adanya pengakuan dan legalisasi institusi pendidikan Islam tradisional dalam sistem pendidikan nasional. Program ini merupakan upaya untuk menjembatani kekayaan kurikulum khas pesantren dengan tuntutan sistem pendidikan nasional. Konsistensi pemerintah untuk menyeragamkan kurikulum pendidikan seolah buyar karena adanya kebijakan pengakuan pada lembaga pendidikan pesantren muadalah oleh pemerintah. Tidak ada penyeragaman kurikulum pesantren, yang ada hanyalah pengakuan secara tegas keberadaan kurikulum pesantren sebagai bagian dari kurikulum pendidikan nasional, kurikulum satu pesantren dengan kurikulum pesantren lainya banyak yang berbeda, masing-masing pesantren mempunyai kekhasan.

Selama ini, pesantren *salafiyah* (tradisional), fokus pada pengkajian mendalam ilmu-ilmu agama melalui kitab kuning. Pesantren *'asyriyah* (modern) fokus pada kajian dirosah Islamiyah dengan pola pendidikan mu'allimin. Kedua jenis pesantren di atas berjalan berdasarkan kekhasannya, tanpa kurikulum dan standar ijazah formal yang diakui pemerintah. Pendidikan pesantren merupakan kekayaan sistem pendidikan di Indonesia, sekaligus menjadi persoalan karena proses dan output pendidikannya dianggap tidak konvensional (belum sejalan dengan standar nasional). Dalam implementasinya, masih terjadi ketegangan antara standarisasi pendidikan nasional dengan otonomi kurikulum pesantren muadalah.

Pada era Orde Baru, pemerintah cenderung menempatkan pesantren sebagai lembaga pendidikan non-formal atau luar sekolah (seperti yang tercantum dalam PP Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah). Ini berarti lulusan pesantren seringkali kesulitan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi di perguruan tinggi umum atau mendapatkan pengakuan formal atas kompetensi mereka. Namun di sisi lain, beberapa pesantren, seperti Pondok Modern Darussalam Gontor, telah lama mendapatkan pengakuan atau muadalah

(penyetaraan) dari institusi pendidikan di luar negeri, seperti Al-Azhar Mesir, sejak tahun 1950-an.

Umar Bukhori lebih menguatkan informasi bahwa pengakuan kesetaraan (*muadalah*) bagi pesantren ini diawali dengan pengakuan beberapa pesantren di Indonesia oleh lembaga pendidikan tinggi Islam di luar negeri, terutama Timur Tengah. Kemudian pada tahun 1998, pemerintah melalui Dirjen Pembinaan Keagamaan Agama Islam mengakui kesetaraan pesantren pondok *modern Gontor Ponorogo* dan pondok pesantren *al-Amien Prenduen Sumenep*. Sejak adanya pengakuan tersebut, kedua pesantren tersebut diperkenankan menyelenggarakan Evaluasi Belajar Tahap Akhir Nasional (EBTANAS).¹

Pertanyaannya, apakah hanya dua pesantren di atas saja yang butuh pengakuan dari pemerintah? Bagaimana dengan nasib santri yang ada di pesantren-pesantren yang hanya menyelenggarakan sistem pendidikan tradisional dan khas? Siswa-siswi mereka dianggap *Anak Tidak Sekolah* (ATS). UNICEF pada tahun 2020 pernah merilis bahwa diantara beberapa faktor penyebab ATS adalah kurangnya ketersediaan dan keterjangkauan layanan pendidikan dan pelatihan di beberapa daerah, kurangnya relevansi dan mutu layanan pendidikan dan pelatihan, hambatan ekonomi dan efek kemiskinan, hambatan sosial-budaya/persepsi negatif pentingnya pendidikan, termasuk pesantren.

Kementerian PPN/Bappenas menyampaikan data bahwa sekurang-kurangnya ada sekitar empat juta lebih anak yang ATS (Aisyah, 2024). Kemungkinan data di atas, meliputi anak bangsa yang berada pada pondok pesantren. Sebagai bagian dari warga bangsa yang butuh pendidikan, mereka pun seharusnya tidak boleh luput dari perhatian pemerintah. Mereka mempunyai hak yang sama dan harus diperlakukan sama dengan warga bangsa lainnya. Jangan sampai menjadi bagian dari warga bangsa yang dianggap menjadi bagian dari masalah, sebagaimana pernah dijelaskan oleh pemangku kebijakan di wilayah propinsi Jawa Barat.

¹ Umar Bukhory, *Status Pesantren Mu'adalah; Antara Pembebasan dan Pengebirian Jatidiri Pendidikan Pesantren*, (Karsa, IXI, 2011), 48–61 <<http://pendis.depag.go.id/file/dokumen/bukusaku.p>>.

Menyimak apa yang pernah disampaikan oleh Kepala Seksi Kurikulum Bidang Pendidikan SMA Dinas Pendidikan propinsi Jawa Barat² misalnya, beliau mengatakan bahwa hasil penelitiannya ternyata dunia pendidikan di Jawa Barat mempunyai persoalan aksesibilitas. Ketika dibandingkan antara jumlah siswa yang ada di SMP/MTs dan jumlah siswa yang ada di SMA/SMK/MA ternyata ada ketimpangan yang cukup signifikan. Jumlah siswa yang ada di SMP/MTs di Jawa Barat sekitar 729.000 orang, sedangkan jumlah siswa yang ada di jenjang SMA/SMK/MA sebanyak 429.000 orang. Tidak kurang dari 300.000 siswa SMP/MTs tidak melanjutkan. Kondisi ini memposisikan APK propinsi Jawa Barat di bidang pendidikan berada pada interval akhir di tingkat nasional.

Setidaknya ada empat persoalan kata Kepala Seksi Kurikulum tersebut yang menyebabkan aksesibilitas pendidikan SMA/SMK/MK sebagaimana diungkapkan di atas rendah, yaitu: (1) banyak lulusan SMP/Mts yang tidak melanjutkan pendidikan karena lebih memilih masuk dunia usaha, yaitu pabrik, (2) tidak semua kecamatan di Jawa Barat memiliki lembaga pendidikan setingkat SLTA, artinya pendirian lembaga pendidikan setingkat SLTA tidak merata, (3) karena faktor geografis, lembaga pendidikan setingkat SLTA tidak semua terakses oleh masyarakat karena jaraknya yang jauh, (4) sebagian besar masyarakat usia pendidikan jenjang SLTA berada di pesantren dan mereka ternyata tidak mendapat pengakuan dari pemerintah, sehingga mereka tidak terdata di DAPODIK atau EMIS, aplikasi data pendidikan formal di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta Kementerian Agama.

Hadirnya kurikulum muadalah, seolah mengakomodir tuntutan pesantren untuk memperkuat dua sisi mata uangnya, yaitu nilai dan tradisi khasanah intelektual Islam sekaligus arus globalisasi yang setiap saat bisa bergesekan

² Disampaikan oleh Kepala Seksi Kurikulum SMA Dinas Pendidikan propinsi Jawa Barat pada acara Rapat Koordinasi UN yang diselenggarakan oleh Bidang Madrasah Kantor Wilayah Kementerian Agama propinsi Jawa Barat, pada hari Selasa s.d. Kamis tanggal 7 s.d. 9 November 2017, di Hotel Hemangini Jln. Setiabudhi Bandung

dengan nalar kritis santri yang berbasis Islami dan religius.³ Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren mengatakan bahwa kurikulum pesantren dikembangkan oleh pesantren dengan berbasis kitab kuning atau dirasah Islamiyah dengan pola pendidikan muallimin. Pengakuan pemerintah terhadap kurikulum muadalah pesantren, seolah mengisyaratkan dua hal, *inkonsistensi* pemerintah terhadap implementasi kurikulum pendidikan nasional, dengan memberi keleluasaan kepada pesantren untuk mengembangkan kurikulum tradisionalnya. Di sisi lain, mungkin pemerintah mengharapkan adanya sintesis kurikulum nasional dengan kurikulum pesantren.

Implementasi kurikulum muadalah harus bisa menjadikan kurikulum tradisional pesantren lebih berfungsi. Seperti yang pernah dikatakan Waryono, mantan Direktur Pesantren pada Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI, ada tujuh fungsi yang harus dipetakan dalam kurikulum muadalah, yaitu fungsi *kesesuaian* adalah sesuai dengan kebutuhan, fungsi *integrasi* yaitu integrasi antara santri dan masyarakat, fungsi *diferensiasi* yaitu mengakomodir spesialisasi keilmuan *kyai*, fungsi *menyiapkan* santri untuk bisa berkiprah dan hidup di masyarakat, fungsi *pemilihan* yaitu santri bisa memilih kurikulum yang disediakan pesantren, fungsi *diagnostik* yaitu kurikulum pesantren harus bisa mendiagnosa perubahan dalam masyarakat, dan fungsi *dialogis* yaitu kurikulum pesantren harus bisa mendialektiskan kitab kuning yang ditulis abad kelima hijriyah dengan keadaan saat ini.⁴

Selanjutnya, secara umum kesalahan yang sering terjadi dalam kurikulum sebuah lembaga pendidikan adalah tidak liniernya penentuan arah kurikulum dengan tujuan umum pendidikan, baik secara filosofis ataupun secara paradigmatis. Ke mana arah pendidikan secara filosofis atau paradigmatis, ke sana implementasi kurikulum harus diarahkan. Mungkin, sintesis yang diinginkan pemerintah dengan adanya pengakuan kurikulum pesantren melalui program muadalah pada tataran linieritas tujuan kurikulum pendidikan pesantren dengan

³ Mohammad Takdir, *Modernisasi Kurikulum Pesantren, Konsep Dan Metode Antroposentris*, ed. by Yanuar dan Yudi, Pertama (Yogyakarta: IRCiSoD Jogjakarta, 2018), 112.

⁴ Waryono, *Kemenag Petakan Kurikulum Pesantren*, <https://www.kemenag.go.id/Nasional/Kemenag-Petakan-Kurikulum-Pesantren-F12o5n> (Jakarta, 18 August 2020).

tujuan pendidikan nasional. Bagaimanapun prosesnya, yang penting tujuan endingnya sama, yaitu sama-sama mencerdaskan kehidupan bangsa.

Ketidaklinieran tujuan kurikulum dengan tujuan pendidikan secara umum sering dikritisi oleh Ahmad Tafsir, guru besar Pendidikan Islam Universitas Islam Negeri SGD Bandung. Beliau mengatakan dalam pengantar buku *Pemikiran Pendidikan Islam* yang ditulis oleh Mahmud, kesalahan (sebagian) pendiri lembaga pendidikan itu adalah sering mengabaikan landasan filosofis dan paradigmatis, yaitu untuk apa lembaga pendidikan itu didirikan?⁵ Secara umum tujuan pendidikan sering disesuaikan dengan paradigma perubahan, perubahan waktu, tempat dan pemikiran.

Prinsip fleksibilitas kurikulum untuk menyesuaikan dengan perubahan zaman, pernah diisaratkan oleh Al-Syahrastani dalam kitabnya *Al-Milal wa Al-Nihal* yang mengadopsi konsep para filsuf Yunani yang diterjemahkan ke dalam bahasa Arab:

لَا تُكْرِهُوا أَوْلَادَكُمْ عَلَى أَثَارِكُمْ (أَوْ آدَابِكُمْ)، فَإِنَّهُمْ مَخْلُوقُونَ لِزَمَانٍ غَيْرِ زَمَانِكُمْ

Artinya: *Janganlah kalian memaksa anak-anak kalian untuk mengikuti jejak/kebiasaan kalian, karena sesungguhnya mereka diciptakan untuk zaman yang berbeda dengan zaman kalian.*⁶

Terkait perubahan paradigma, Tedi Priatna pernah menjelaskan bahwa perkembangan paradigma selalu seiring dengan perkembangan cara pikir manusia dalam memahami kehidupan. Termasuk di dalamnya paradigma pendidikan, menurut beliau pada setiap *melieunya* pendidikan seharusnya bersikap *kooperatif* sekaligus *kompetitif* dalam menyikapi perkembangan paradigma ini. Sehubungan dengan penjelasan di atas, maka kurikulum yang merupakan ruh atau *core* sebuah lembaga pendidikan selayaknya di *update* sesuai dengan perkembangan paradigma peradaban manusia. Minimal menurut beliau, pada dekade terakhir, ramai diperbincangkan tentang tiga perkembangan paradigma pendidikan, yaitu

⁵ Mahmud, *Pemikiran Pendidikan Islam*, ed. by Beni Ahmad Saebani, 1st edn (Bandung: Pustaka Setia, 2011), ix.

⁶ Abu al-Fath Muhammad bin Abdul Karim Asy-Syahrastani, *Al-Milal Wa An-Nihal* (Beirut: Darul Ma'rifah, 2015).

*konservatif, liberal, dan paradigma kritis/radikal.*⁷

Lain halnya dengan Reche yang disitir oleh M. Noor Syam yang disampaikan kembali oleh Mahmud, pernah mengatakan bahwa hubungan pendidikan dengan keadaan sosial sangatlah erat. Maka pendidikan mungkin mengalami *spesialisasi* dan *institusionalisasi* sesuai kebutuhan masyarakat yang kompleks dan modern. Beliau mengatakan bahwa pendidikan merupakan aktivitas sosial, yang berfungsi mentransformasikan suatu keadaan masyarakat menuju keadaan yang lebih baik.⁸ Penjelasan di atas mengisyaratkan bahwa kurikulum akan terus mengikuti keadaan sosial dan kultur lingkungan. Pengakuan terhadap kurikulum pesantren yang mempunyai keadaan sosial dan kultur sendiri, mempunyai basis teori yang memadai. Yang terpenting dari sebuah kurikulum adalah mampu mentransformasikan masyarakat menuju keadaan yang lebih baik. Adapun sistemnya, mengikuti prinsip kurikulum yang relevan, fleksibel, kontinue, efektif dan efisiensi.

Di tengah dinamika globalisasi dan tantangan moral, implementasi kurikulum muadalah memiliki peran krusial dan potensi unik dalam membentuk karakter peserta didik. Untuk menjawab tantangan paradigma pendidikan saat ini, kurikulum muadalah berpeluang besar berkontribusi menguatkan karakter religius dan kedisiplinan. Secara konvensional, kurikulum pesantren berupaya menguatkan kompetensi santri menjadi *mutafaqquh fiddin*, santri yang menguasai sekaligus mampu mengamalkan ilmu agama secara disiplin. Pola atau model yang dilaksanakan pesantren selama ini adalah kemandirian, artinya target pendidikan diserahkan kepada santri secara mandiri dibawah bimbingan kyai. Kurikulum muadalah sedikit banyak akan menguji *religiusitas* dan kemandirian santri untuk disiplin mematuhi aturan sistem pendidikan secara formal.

Implementasi kurikulum muadalah di pesantren, menguatkan nilai religius yang berkontribusi pada pengembangan individu, meliputi aspek moral, etika, dan kesejahteraan psikologis. Karakter religius ini akan berdampak pada kohesi sosial,

⁷ Tedi Priatna, *Paradigma Pendidikan Islam, Ikhtiar Mewujudkan Pendidikan Bernilai Ilahiah Dan Insaniah Di Indonesia*, ed. by Jaih Mubarak, Pertama (Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004), 165.

⁸ Mahmud, *Pemikiran Pendidikan Islam*, 11.

pembentukan nilai-nilai masyarakat, dan pencegahan masalah sosial. Demikian pula nilai kedisiplinan, untuk pribadi anak didik dapat meningkatkan kemampuan manajemen diri, dan peningkatan produktivitas individu. Untuk kepentingan sosial, nilai kedisiplinan akan meningkatkan ketertiban sosial, efisiensi institusi, dan kepatuhan terhadap norma serta hukum dalam masyarakat.

Kurikulum muadalah yang dilaksanakan di pesantren, akan menjadi instrumen efektif dalam menanamkan nilai religius dan kedisiplinan, manakala dilakukan secara integral, adaptif dan kolaboratif dengan kearifan lokal yang telah menjadi tradisi pesantren selama ini. Integrasi kurikulum muadalah dengan kearifan lokal sistem pendidikan pesantren dalam menguatkan karakter religius dan kedisiplinan akan merubah kesan kurikulum pesantren yang selama ini dituding sebagai kurikulum yang pasif, statis, kontraproduktif. Zamaksyari Dhofier pernah meneliti bahwa kurikulum pesantren sebenarnya berubah sesuai zaman, hanya saja perubahannya sangat lambat bahkan nyaris tidak terlihat. Zamaksyari Dhofier mengatakan perubahan kurikulum pesantren didasarkan pada kaidah *almuhafadhatu 'ala qodimi al-sholih, wal akhdzu min jadidin nafi* (memelihara nilai lama yang baik, mengadopsi nilai baru yang lebih bermanfaat).⁹

Terlepas dari kelebihan dan kekurangan model kearifan lokal kurikulum pesantren, diakui atau tidak, sebenarnya telah lama mengundang rasa takjub para ahli. *Survivalitas* kurikulum pesantren tidak lepas dari kesuksesannya menginternalisasikan nilai religius dan kedisiplinan selama ini. Minat orang tua menitipkan anak-anaknya ke pesantren bukan tanpa alasan, alasan utamanya adalah pesantren mampu memperbaiki akhlak anak-anaknya, kinerja kurikulum pesantren dianggap sangat efektif. Secara umum, nyaris tidak pernah terdengar santri pesantren tawuran, terjaring kasus narkoba, ataupun amoral. Secara kasuistik, tidak dapat dipungkiri ada beberapa kasus di atas yang terjadi pada sebagian pondok pesantren, tetapi tidak berlaku secara umum.

Masyarakat, saat ini sangat menaruh harapan kuat pada pendidikan, agar anak-anaknya, disamping mempunyai masa depan baik, juga mempunyai karakter

⁹ Zamaksyari Dhofier, *Tradisi Pesantren, Studi Pendangan Hidup Kyai Dan Visinya Mengenai Masa Depan Indonesia* (Jakarta: LP3ES, 2011), 44.

positif yang kuat. Pemerintah yang merepresentasikan masyarakat mengharapkan pendidikan menguatkan karakter Pancasila. Dua dari delapanbelas karakter Pancasila yang direkomendasikan pemerintah adalah religius dan kedisiplinan¹⁰, atau *rahmatan lil'alam* (pasal 6 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren).

Kurikulum muadalah diharapkan mampu meminimalisir pandangan dikotomi ilmu yang selama ini terjadi. Masih ada kekhawatiran di kalangan pesantren, kehadiran pendidikan modern yang mengajarkan ilmu umum akan menjadi virus kekhasan pesantren, mengadopsi sistem pendidikan modern, sama saja membunuh karakter pesantren. Statemen yang mengarah ke konsep di atas pernah terlontar dalam wasiat almarhum Mama Choer Affandi, pendiri sekaligus pimpinan pertama pondok pesantren Mifathul Huda Manonjaya Kabupaten Tasikmalaya. Keluarga penerus pesantren memegang erat amanat pendiri dengan tidak pernah mengadopsi satuan pendidikan modern di lingkungan pesantren.

Ahmad Syalabi pernah menjelaskan bahwa *mindset* atau pandangan seperti di atas pernah terjadi pada zaman klasik. Ahmad Syalabi mennguraikan bahwa pada masanya dahulu, ada keterpisahan *locus* perkembangan ilmu-ilmu agama Islam dan *sains*. Ilmu-ilmu keagamaan Islam lebih banyak berkembang di *Kuttab*, dan yang menjadi pendorong berkembangnya ilmu-ilmu keagamaan Islam ini adalah keharusan untuk mempelajari al-Qur'an.

Ilmu-ilmu *sains* lebih banyak berkembang di lembaga pendidikan *informal*, seperti kedokteran berkembang di rumah sakit, ilmu kimia berkembang di laboratorium, walaupun sebagian pengembangnya adalah para ilmuwan muslim, diantaranya adalah Ibnu Sina. Lahirnya *kuttab* ataupun madrasah sebagai tindak lanjut pendidikan yang diselenggarakan di masjid pada zaman klasik, pada hakikatnya dalam rangka mengembangkan dan mendiseminasikan al-Qur'an, saat itu belum menyentuh *sains* yang merupakan pengejawantahan sebagian ilmu yang ada pada al-Qur'an. Ada sebagian madrasah yang mempelajari *sains*, tapi tidak

¹⁰ Kemendikbud, *Permendikbud* (Jakarta: Dirjen Peraturan Perundang-undangan Kemenkumham RI, 2018).

dalam arti berlaku secara umum.¹¹

Kurikulum muadalah menghendaki kesetaraan yang merujuk pada membentuk aspek kecerdasan dan potensi minat santri, tuntutan dunia kerja, tuntutan pembangunan dan pertanggungjawaban akademik. Kurikulum muadalah berupaya untuk mempertahankan kekhasan dan kearifan lokal sistem pendidikan pesantren, sekaligus mendongkrak nilai yang belum terpetakan, misalnya nilai akademik, yaitu hasil belajar akhir siswa dalam jangka waktu tertentu.¹²

Peneliti pernah mengamati pada pondok pesantren salafiyah Miftahul Huda Manonjaya sebelumnya, tidak ada ukuran tenggat waktu tempuh bagi santri sampai kapan dia harus berada pada kelas atau tahap tertentu, dan tidak ada batasan minimal penguasaan materi tertentu. Ukuran lama, waktu tempuh dan kompetensi santri dilakukan secara mandiri di bawah bimbingan kyai. Naik atau tidaknya marhalah santri ditentukan pada kesadaran santri itu sendiri. Karenanya, tenggat waktu santri untuk mondok pada pesantren Miftahul Huda Manonjaya bervariasi, ada yang lima tahun, delapan tahun, bahkan ada yang sudah sebelas tahun¹³.

Implementasi kurikulum muadalah ingin menjembatani *konservatisme* dan *tradisionalisme* pesantren dengan tuntutan kekinian. Kurikulum muadalah menggambarkan upaya dan ikhtiar pesantren menyesuaikan kurikulumnya dengan perkembangan pendidikan di masa kini. Implementasi kurikulum muadalah akan menjadi model kurikulum pesantren yang berkemajuan, berkebaruan, berkarakter, sekaligus berkekhasan. Implementasi kurikulum muadalah diharapkan memberikan kontribusi bagi pembangunan bangsa dalam hal pendidikan.

Implementasi kurikulum muadalah akan melahirkan model sistem pendidikan yang mudah, murah, tetapi berkualitas. Implementasi kurikulum muadalah berpeluang besar menjadikan pesantren sebagai *dinamisator* dan *katalisator* pemberdayaan manusia dan *iptek*. Apalagi kalau implementasi kurikulum muadalah ini berbasis kearifan lokal, maka peran pesantren akan lebih

¹¹ Ahmad Sjalabi, *Sejarah Pendidikan Islam*, ed. by Muchtar Jahja (Jogjakarta: Bulan Bintang, 1972), 104-105.

¹² Sumadi Suryabrata, *Psikologi Pendidikan* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006).

¹³ Hasil observasi lapangan di Komplek Pesantren Miftahul Huda Manonjaya Tasikmalaya Kab. Tasikmalaya, pada tahun 2025.

kuat menangkal arus negatif budaya global yang *hedonis* dan *materialistis*, sekaligus membuka akses pendidikan yang lebih tinggi, sehingga melahirkan kader ulama, pemimpin dan hamba Allah yang sholeh, produktif dan berkarakter.

Implementasi kurikulum muadalah harus menjadi jawaban tantangan pendidikan ke depan, mampu mengantisipasi tantangan perubahan global, menguatkan pendidikan karakter, kemajuan teknologi, perkembangan pengetahuan dan *pedagogi*, memenuhi kebutuhan *kompetensi* sumber daya manusia seperti komunikasi, berfikir kritis, dan lain sebagainya. Implementasi kurikulum muadalah harus dilakukan untuk menghadapi dinamika kurikulum, baik dinamika *perkembangan*, terutama perkembangan akademik, industri dan sosial budaya, ataupun dinamika *kebutuhan*, butuh pengetahuan, butuh keterampilan, termasuk butuh perubahan sikap dan karakter.

Direktori pondok pesantren pada Kantor Wilayah Kementerian Agama propinsi Jawa Barat menunjukkan tidak kurang dari 32 pesantren di Jawa Barat telah mengimplementasikan kurikulum muadalah. Jumlah tersebut cukup signifikans karena dari 165 pondok pesantren di Indonesia yang mengimplementasikan kurikulum muadalah, 19 persen ada di propinsi Jawa Barat. Pondok pesantren Miftahul Huda Manonjaya Tasikmalaya dan pondok pesantren Al-Ikhlas Kuningan merupakan dua dari sekian pesantren yang mengadopsi dan mengimplementasikan kurikulum muadalah.

Pondok pesantren Miftahul Huda Manonjaya Tasikmalaya dan pondok pesantren Al-Ikhlas Kuningan merupakan dua pondok pesantren besar dengan kapasitas santri ratusan bahkan ribuan. Penerapan kurikulum muadalah berbasis kearifan lokal pada kedua pesantren di atas akan sangat berkontribusi pada upaya transformasi pendidikan secara nasional khususnya dalam membentuk karakter religius dan kedisiplinan. Implementasi kurikulum muadalah berbasis kearifan lokal akan memperkuat tanggungjawab pesantren dalam mentransformasikan pendidikannya dan memperkuat kekhasannya.

Implementasi kurikulum muadalah berbasis kearifan lokal pada pesantren ini bukan tanpa tantangan dan persoalan. Di satu sisi, pemerintah melaksanakan pola implementasi kurikulum *administratif*, di mana implementasi kurikulum

dilaksanakan secara *deduktif*, sistematisasinya mulai dari pemegang kebijakan, lalu dijabarkan secara hirarki sampai pada satuan pendidikan, seolah mengabaikan problematika lingkungan. Implementasi kurikulum muadalah justru sebaliknya, model yang digunakan menggunakan pola *situasional* yang menekankan pada *fleksibilitas*, intensif dilaksanakan pada tingkat satuan pendidikan dengan mempertimbangkan kearifan lokal.

Fenomena dan situasi implementasi kurikulum muadalah berbasis kearifan lokal pesantren yang *inkonsistensi* di atas akan menarik untuk diteliti lebih jauh. Untuk melengkapi informasi *kevalidan*, *kepraktisan* dan *keefektifan*-nya, peneliti mencoba mendalaminya melalui kegiatan penelitian pada kedua pesantren sebagai sampel sebagaimana dikemukakan di atas, dengan tema *Implementasi Kurikulum Muadalah Berbasis Kearifan Lokal dalam Membentuk karakter Religius dan Kedisiplinan (Penelitian di Pesantren Muadalah Miftahul Huda Manonjaya Tasikmalaya dan Pesantren Muadalah Al-Ikhlash Kuningan)*.

B. Perumusan Masalah

Ada fenomena yang menarik terkait dengan implementasi kurikulum muadalah berbasis kearifan lokal dalam membentuk karakter religius dan kedisiplinan di atas. Stigma yang melekat pada sistem pendidikan pesantren sebagai lembaga pendidikan yang ajeg, sulit untuk menerima perubahan, ternyata terbantahkan dengan terbukanya 32 pesantren di Jawa Barat yang mengadopsi satuan pendidikan muadalah. Mereka terbuka untuk mengimplementasikan kurikulum muadalah berbasis kearifan lokal untuk menguatkan karakter religius dan kedisiplinan dalam sistem pendidikannya.

Keterbukaan dan keinginan pesantren untuk melakukan perubahan sebenarnya pernah menjadi *output* penelitian para tokoh pendidikan terdahulu. Dua diantara tokoh-tokoh pendidikan tersebut adalah Zamakhsyari Dhofier dan Azyumardi Azra. Zamakhsyari Dhofier pernah mengemukakan bahwa pesantren sebenarnya mengalami perubahan dari masa ke masa, hanya perubahannya sangat lambat dan sangat terbatas, perubahannya nyaris tidak kelihatan. Perubahan dan keterbukaan pesantren, terutama dalam mengadopsi kurikulum muadalah akan menguatkan survivalitas pesantren sekaligus

meningkatkan mutu dan akses pendidikan pesantren, terutama dalam membentuk pendidikan karakter.

Prinsip yang melandasi perubahan pesantren adalah kaidah *almuhafadzoh 'ala qodimil ashlah, wal akhdzu min jadidin Nafi'* (memelihara nilai-nilai lama yang lebih baik, mengambil nilai-nilai baru yang lebih bermanfaat). Salah satu contoh perubahan karakter pesantren yang dikemukakan *Dhofier* adalah hilangnya tradisi *santri kelana*. Tereliminasinya tradisi santri kelana ini lebih dikarenakan diadopsinya sistem kelas yang bertingkat-tingkat sehingga santri harus tinggal dalam satu pesantren selama bertahun-tahun.¹⁴

Menurut Azyumardi Azra, modernisasi pendidikan pesantren dari masa ke masa diawali oleh tantangan yang diberikan oleh kaum reformis atau modernis Muslim. Kaum reformis Muslim berpendapat diperlukan reformasi sistem pendidikan Islam untuk menjawab tantangan kolonialisme dan ekspansi Kristen. Untuk menjawab tantangan di atas, kaum reformis Muslim melahirkan sekolah umum model Belanda yang diberi muatan pengajaran Islam dan madrasah modern yang secara terbatas mengadopsi substansi dan metodologi pendidikan modern Belanda. Sikap dari pendidikan tradisional pesantren di Jawa dalam batas-batas tertentu mengikuti jejak langkah kaum reformis. Dalam batas-batas tertentu, pesantren melakukan sejumlah akomodasi dan penyesuaian sebagai cara agar terjadi kontinuitas pesantren dan inovasi pendidikan untuk kemanfaatan santri, seperti sistem penjenjangan, kurikulum yang jelas, dan sistem klasikal.¹⁵

Kurikulum muadalah, implementasinya akan berbasis pada karakter, tradisi dan kearifan lokal pesantren. Sejak awal, pesantren komitmen untuk menjadikan *output* pendidikannya sebagai alumni yang *tafaqquh fiddin*. Konsep lulusan yang *tafaqquh fiddin* akan berkembang sejalan dengan perkembangan zaman. Pemahaman agama pada era global ini bukan semata kegiatan ritual, tetapi menembus pada berbagai lini dan ruang kehidupan. Dewasa ini, hasil

¹⁴ Dhofier, *Tradisi Pesantren, Studi Pendangan Hidup Kyai Dan Visinya Mengenai Masa Depan Indonesia*, 131.

¹⁵ Azyumardi Azra, *Paradigma Baru Pendidikan Nasional, Rekonstruksi Dan Demokratisasi* (Jakarta: Buku Kompas, 2002), 124.

pendidikan Islam seperti pesantren tidak cukup hanya dengan memahami agama saja, tetapi diperlukan sikap dan karakter yang dapat diterima oleh masyarakat. Sikap dan karakter yang diterima masyarakat Indonesia saat ini adalah sikap dan karakter Pancasila.

Bagaimana implementasi kurikulum muadalah berbasis kearifan lokal dalam membentuk karakter, terutama karakter religius dan kedisiplinan pada pesantren? Pertanyaan ini merupakan masalah yang akan menjadi dasar penelitian. Untuk lebih jelasnya, sistematika dan ruang lingkup persoalan yang akan diteliti, peneliti sajikan dalam beberapa rincian pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana merancang kurikulum muadalah berbasis kearifan lokal dalam membentuk karakter religius dan kedisiplinan pada pondok pesantren *Miftahul Huda Manonjaya Tasikmalaya* dan pondok pesantren *Al-Ikhlas Kuningan*?
2. Bagaimana implementasi kurikulum muadalah berbasis kearifan lokal dalam membentuk karakter religius dan kedisiplinan pada pondok pesantren *Miftahul Huda Manonjaya Tasikmalaya* dan pondok pesantren *Al-Ikhlas Kuningan*?
3. Bagaimana evaluasi kurikulum muadalah berbasis kearifan lokal dalam membentuk karakter religius dan kedisiplinan pada pondok pesantren *Miftahul Huda Manonjaya Tasikmalaya* dan pondok pesantren *Al-Ikhlas Kuningan*?
4. Sejauhmana dampak implementasi kurikulum muadalah berbasis kearifan lokal dalam membentuk karakter religius dan kedisiplinan pada pondok pesantren *Miftahul Huda Manonjaya Tasikmalaya* dan pondok pesantren *Al-Ikhlas Kuningan*?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian terkait rumusan masalah di atas, maka jelaslah beberapa hal yang menjadi kajian penelitian ini. Output dari kajian penelitian tersebut inilah yang menjadi tujuan penelitian dimaksud. Untuk lebih jelasnya, tujuan dari dilaksanakannya penelitian ini adalah:

1. Untuk mengidentifikasi bagaimana merancang kurikulum muadalah berbasis kearifan lokal dalam membentuk karakter religius dan kedisiplinan pada pondok pesantren *Miftahul Huda Manonjaya Tasikmalaya* dan pondok pesantren *Al-Ikhlas Kuningan*;
2. Untuk mengetahui implementasi kurikulum muadalah berbasis kearifan lokal dalam membentuk karakter religius dan kedisiplinan pada pondok pesantren *Miftahul Huda Manonjaya Tasikmalaya* dan pondok pesantren *Al-Ikhlas Kuningan*;
3. Untuk menelaah evaluasi dari implementasi kurikulum muadalah berbasis kearifan lokal dalam membentuk karakter religius dan kedisiplinan pada pondok pesantren *Miftahul Huda Manonjaya Tasikmalaya* dan pondok pesantren *Al-Ikhlas Kuningan*;
4. Untuk mengetahui sejauhmana dampak implementasi kurikulum muadalah berbasis kearifan lokal dalam membentuk karakter religius dan kedisiplinan pada pondok pesantren *Miftahul Huda Manonjaya Tasikmalaya* dan pondok pesantren *Al-Ikhlas Kuningan*;

D. Manfaat Hasil Penelitian

Hasil penelitian ini akan memiliki makna sekiranya memiliki beberapa manfaat. Manfaat inilah yang diharapkan peneliti setelah jerih payahnya menjadi sebuah laporan dan teruji secara ilmiah. Beberapa manfaat yang dimaksud di sini adalah manfaat secara *teoritis* dan manfaat *praksis*. Diantara manfaat yang diharapkan secara teoritis dari penelitian ini antara lain:

1. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran bagi kemajuan konsep dan teori kurikulum muadalah berbasis kearifan lokal dalam membentuk karakter religius dan kedisiplinan pada pesantren;
2. Dari segi pengembangan ilmu, penelitian ini mudah-mudahan mampu memperkaya produk, model, dan bukti empirik yang aktual dan faktual tentang teori kurikulum, khususnya kurikulum muadalah berbasis kearifan lokal pada pesantren dalam membentuk karakter religius dan kedisiplinan;

Adapun manfaat secara praksis yang diharapkan peneliti sebagai hasil dari kajian dan penelitian ini sekurang-kurangnya:

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kualitatif mengenai beberapa aspek yang terkait dengan kurikulum muadalah berbasis kearifan

lokal pada pesantren dalam membentuk karakter religius dan kedisiplinan. Para pengelola pesantren terutama pesantren yang sudah dimuadalahkan diharapkan mempunyai gambaran secara praktis terkait kurikulum muadalah yang berbasis pada kearifan lokal, terutama dalam membentuk karakter religius dan kedisiplinan;

2. Hasil penelitian ini diharapkan akan memperkaya informasi terkait implementasi kurikulum muadalah berbasis kearifan lokal dalam membentuk karakter religius dan kedisiplinan pada pesantren kepada masyarakat luas, sehingga mereka mempunyai banyak opsi pilihan untuk menjawab pertanyaan ke arah mana seharusnya orientasi pendidikan putra putri mereka diarahkan pada zaman modern dan global sekarang ini;
3. Informasi hasil penelitian ini diharapkan mampu menambah penjelasan secara terang benderang bahwa pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam yang kaya dengan kearifan lokalnya, disamping mampu memperbaiki moral dan karakter anak didiknya, terutama karakter religius dan kedisiplinan, juga mampu bersaing dan setara dengan lembaga pendidikan formal lainnya. Kesetaraan dimaksud terutama terkait dengan kesempatan untuk melanjutkan studi ke jenjang yang lebih tinggi, kesetaraan dalam kesempatan untuk mendapatkan kerja, dan setara dalam posisi sosial lainnya;
4. Hasil penelitian ini diharapkan mampu merubah orientasi pendidikan pesantren pada umumnya. Pesantren yang *survive* serta mampu bersaing dengan lembaga pendidikan lain, disamping pesantren diposisikan sebagai lembaga pendidikan yang berdasar pada titah agama, maka implementasi kurikulum muadalah berbasis kearifan lokal dalam membentuk karakter religius dan kedisiplinan ini harus menjadi rujukan peningkatan akses dan mutu pendidikan pesantren. Implementasi kurikulum muadalah yang berbasis kearifan lokal dalam membentuk karakter religius dan kedisiplinan di pesantren ini akan melahirkan output pesantren sebagai hamba Allah (*'abdullah*) dan *khalifatullah*.

E. Ruang Lingkup dan Batasan Penelitian

Penelitian ini menggabungkan beberapa variabel, yaitu kekhasan sistem tata kelola kurikulum muadalah, internalisasi kearifan lokal (*local wisdom*), membentuk karakter santri di dua lokus pesantren. Agar penelitian ini tetap fokus, tajam, dan tidak bias secara metodologis, maka dibatasi pada ruang lingkup (*Scope*) dan batasan penelitian (*Limitation*), yaitu:

1. Ruang Lingkup Penelitian (*Scope*) ini adalah:

a. Materi penelitian (*variabel/konsep*):

- 1) Implementasi kurikulum muadalah: dibatasi pada proses perencanaan (perancangan dokumen kurikulum pesantren), implementasi/pembelajaran, evaluasi, serta dampak kurikulum yang berlaku di kedua pesantren;
- 2) Berbasis kearifan lokal: batasan nilai kearifan lokal difokuskan pada kearifan internal dan eksternal. Kearifan internal adalah tradisi khas kepesantrenan lokal Jawa Barat, kearifan eksternal dikorelasikan dengan nilai-nilai budaya dan filosofi Sunda (misalnya konsep *silih asih*, *silih asah*, *silih asuh*, atau *papatah kolot*);
- 3) Membentuk karakter: karakter yang diteliti secara spesifik hanya dua, yaitu karakter religius (aktivitas ibadah, akhlak, kedalaman spiritual) dan karakter kedisiplinan (kepatuhan terhadap sanksi/aturan pesantren, ketepatan waktu, dan konsistensi kegiatan).

b. Objek (lokus/tempat):

Penelitian ini berbentuk studi komparatif/multi-situs yang terbatas hanya pada dua lokasi: Pesantren Muadalah Miftahul Huda Manonjaya Tasikmalaya dan Pesantren Muadalah Al-Ikhlas Kuningan.

c. Subjek penelitian (Responden/Informan):

Informan kunci dibatasi pada jajaran pimpinan pesantren (Mudir/Kyai), tim pengembang kurikulum, dewan guru (*asatidz*), pengasuh/pembina santri, dan perwakilan santri pada jenjang muadalah.

2. Batasan Penelitian (*Limitation*)

Batasan ini menjelaskan kondisi riil di lapangan yang berada di luar

kendali peneliti:

- a. Hasil: penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi kasus di dua pesantren spesifik (*Miftahul Huda* dan *Al-Ikhlas*), maka temuan atau kesimpulan dari penelitian ini tidak dapat digeneralisasikan secara mutlak untuk seluruh pesantren muadalah atau pesantren secara umum di Indonesia;
- b. Subjektivitas data: pengumpulan data sangat bergantung pada hasil wawancara, observasi, dan dokumen tertulis. Ada potensi bias subjektivitas dari para informan (kyai atau pengasuh, ustadz, santri) dalam memberikan penilaian atau pernyataan terkait keberhasilan penanaman karakter santri;
- c. Batasan dampak: peneliti hanya mengamati dan mengevaluasi pembentukan karakter religius dan kedisiplinan santri selama masa studi mereka aktif di dalam lingkungan pesantren;
- d. Faktor eksternal: perubahan atau membentuk karakter santri sebenarnya bisa dipengaruhi oleh faktor luar seperti latar belakang asuhan orang tua di rumah atau paparan media digital (gawai). Penelitian ini memiliki keterbatasan untuk mengontrol atau memisahkan faktor-faktor luar tersebut dari pengaruh murni implementasi kurikulum muadalah di pesantren.

F. Kerangka Pemikiran

Inti dari pendidikan adalah kurikulum. Kurikulum merupakan alat untuk mencapai tujuan pendidikan. Disamping sebagai alat, kurikulum pun merupakan pedoman dalam pelaksanaan proses pembelajaran. Tanpa kurikulum, pendidikan akan berjalan tanpa arah. Maha Guru sekaligus pencipta alam semesta Allah Swt menciptakan kurikulum sebagai *guiden* kehidupan manusia di alam ini, QS al-Maidah, 5: 48:

...إِنَّا جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا... (المائدة: ٤٨)

Artinya: Untuk setiap ummat, Kami jadikan dari mereka, syariat (aturan) dan jalan yang sangat terang.

Ke mana dan bagaimana pendidikan diarahkan dan dilaksanakan, tertuang pada kurikulum. Karenaya, kegiatan pendidikan tanpa kurikulum sama saja dengan berjalan tanpa mata atau dalam keadaan gelap gulita. Dalam istilah *Jasa Ungguh Muliawan*, pendidikan tanpa kurikulum yang terarah, sistematis, terpadu

dan berkelanjutan, maka misi, sasaran, orientasi, dan tujuan dari proses kependidikan pada lembaga pendidikan akan kacau dan tumpang tindih. *Output* pendidikan tidak akan mempunyai kompetensi dan kemampuan intelektual sesuai dengan yang diharapkan, bahkan mungkin mengarah pada penyimpangan-penyimpangan.¹⁶

Seorang tokoh pendidikan nasional Oemar Hamalik pernah menyampaikan bahwa secara umum ada tiga fungsi utama dari kurikulum, yaitu fungsi *konservatif*, fungsi *kritis* dan *evaluatif*, serta fungsi *kreatif*. Fungsi *kreatif* mengandung arti bahwa kurikulum berperan untuk melestarikan dan mewariskan nilai-nilai budaya, pengetahuan, dan keterampilan yang dianggap luhur dan masih relevan dari generasi ke generasi. Fungsi *kritis* dan *evaluatif* bermakna bahwa kurikulum memiliki tanggung jawab untuk menyeleksi dan mengevaluasi nilai-nilai dan budaya lama maupun baru, memilih mana yang masih sesuai untuk dipertahankan dan mana yang harus diperbaharui atau ditinggalkan agar sesuai dengan tuntutan zaman. Sedangkan fungsi *kreatif* menjelaskan bahwa kurikulum harus mampu mengembangkan dan menciptakan hal-hal baru yang relevan dengan perkembangan masyarakat dan masa depan, peserta didik harus mampu beradaptasi, berinovasi, menghadapi tantangan zaman yang terus berubah.¹⁷

Lebih teknis, kurikulum mempunyai fungsi sebagai pedoman kerja. Kurikulum sangat urgen digunakan oleh guru, kepala sekolah atau pihak terkait lainnya sebagai panduan dalam pelaksanaan proses pembelajaran, penyusunan program sekolah dan evaluasi. Selanjutnya, kurikulum dapat dijadikan sebagai alat ukur. Kemampuan siswa dan kriteria ketercapaian tujuan pendidikan dapat diukur oleh kurikulum. Kurikulum pun berfungsi untuk penyesuaian dan diferensiasi. Kurikulum akan mampu melayani perbedaan minat, bakat, dan kecepatan belajar setiap peserta didik.

Secara alamiyah dan berdasarkan hukum *ilahiyah*, kurikulum itu telah ada sejak alam ini ada. Ayat al-Qur'an pada surat *al-Maidah* ayat (48) di atas

¹⁶ Jasa Ungguh Muliawan, *Ilmu Pendidikan Islam, Studi Kasus Terhadap Struktur Ilmu, Kurikulum, Metodologi Dan Kelembagaan Pendidikan Islam*, Pertama (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2015), 142.

¹⁷ Oemar Hamalik, *Dasar-Dasar Pengembangan Kurikulum* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007), 12-13.

membuktikan hal itu. Perbedaannya bahwa pada setiap zaman kurikulum ini selalu mengalami perubahan. Supriatna pernah menyampaikan bahwa tidak pernah ditemukan kurikulum pada masa klasik sebagaimana kurikulum pada masa modern. Kurikulum masa klasik hanya difahami sebagai objek atau materi-materi ilmu pengetahuan yang diajarkan dalam suatu proses pendidikan. Lain halnya dengan kurikulum yang difahami pada zaman modern sekarang ini, Supriatna mengatakan bahwa berdasarkan dampaknya pada siswa, kurikulum dibedakan sebagai kurikulum ideal, kurikulum formal, kurikulum instruksional, kurikulum operasional, dan kurikulum eksperiensial. Betapa kompleks makna kurikulum sebagaimana klasifikasi yang disampaikan Supriatna di atas.

Lebih jauh Supriatna menjelaskan bahwa pada masa Rasulullah Saw, pendidikan dilaksanakan pada sekolah yang sangat luas tanpa dibatasi dinding kelas. Rasul menyampaikan ajarannya di mana saja, di rumah, di mesjid, di jalan, di pasar dan di tempat lainnya. Pendidikan yang bisa dibedakan pada masa Rasulullah Saw adalah periode Makkah dan periode Madinah. Periode Makkah adalah sejak beliau diutus menjadi *Rasul Allah* hingga beliau hijrah ke Madinah. Periode Madinah adalah sejak beliau hijrah ke Madinah sampai dengan beliau meninggal dunia.

Pada masanya dahulu, pendidikan dilakukan hanya berdasarkan interaksi keluarga, contohnya keluarga Nabi Adam. Dalam sejarah Islam pernah dikatakan bagaimana Nabi Adam menjodohkan anak-anaknya dengan mempertimbangkan warna kulit. Dalam hal ini, Nabi Adam mengajarkan pada anak-anak mereka bahwa martabat manusia tidak ditentukan oleh lahiriyahnya saja, tapi juga unsur bathiniyahnya, ada perangkat keras ada perangkat lunak.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّ اللَّهَ لَا يَنْظُرُ إِلَى صُورِكُمْ وَأَمْوَالِكُمْ، وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَى قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ (مُسْلِمٌ)

Artinya: “Sesungguhnya Allah tidak melihat rupa dan hartamu, tetapi Allah hanya melihat hatimu dan amalmu”.

Pada masa itu, manusia sebagai makhluk pendidikan secara manual mampu mengambil pelajaran dari alam, seperti Kabil mengambil pelajaran tentang cara memperlakukan jenazah dari peristiwa burung yang menguburkan burung lain

yang telah mati. Peristiwa burung yang menguburkan burung lain yang telah mati, seolah ilustrasi bahwa alam pun memberikan pelajaran pada manusia.

Analisis yang pernah dikemukakan oleh Oemar Hamalik pada alinea sebelumnya menggambarkan bahwa kurikulum selalu berkaitan dengan masa lalu, masa sekarang dan masa yang akan datang. Kurikulum senantiasa berkembang mengikuti keadaan, baik global ataupun lokal. Karenanya secara prinsip kurikulum itu harus memenuhi unsur *universal*, *fleksibel*, *relevan*, dan *fokus*. Untuk mendukung fungsi dan peran kurikulum di atas, maka kurikulum bukan saja harus memperhatikan keadaan global, tapi juga harus memperhatikan kearifan lokal.

Secara teoritis pernah berkembang dua teori implementasi kurikulum yang paradigmanya berbeda. Tyler pernah mengemukakan contoh model kurikulum bersifat *deduktif-rasional*, *topdown*. Titik awal kurikulum dimulai dari tujuan umum, yaitu filosofi, kebijakan nasional, tujuan pendidikan yang sangat luas. Perumusan kurikulum dimulai dari tingkat atas, kemudian dijabarkan secara rinci ke bawah menjadi silabus, materi pelajaran, kegiatan kelas, tujuan pembelajaran khusus. Implementasi kurikulum deduktif ini harus *koheren*, *konsisten*, dan selaras dengan tujuan dan standar yang telah ditetapkan secara formal. Kelebihan model implementasi kurikulum ini adalah lebih terstruktur, terarah, dan memiliki dasar filosofis yang kuat. Tetapi kelemahannya adalah cenderung kurang *fleksibel* dan kurang *relevan* dengan kebutuhan spesifik di tingkat lapangan.

Taba mengemukakan model implementasi kurikulum yang bersifat *induktif-grass roots*. Titik awal model kurikulum ini dari pengalaman kongkrit, kebutuhan siswa atau masalah yang ditemukan guru di lapangan. Perumusan kurikulum dimulai dari tingkat bawah, dalam hal ini pengalaman guru, fenomena kelas, eksperimen atau inovasi, kemudian disintesis dan digeneralisasi untuk membentuk prinsip dan tujuan yang lebih luas. Model kurikulum ini lebih *relevan*, *inovatif*, dan sesuai dengan kebutuhan nyata peserta didik dan masyarakat lokal. Kelebihan lain dari kurikulum ini adalah mendorong kreativitas guru, dan menghasilkan inovasi yang realistis di tingkat operasional. Tetapi model ini pun mengandung kelemahan, yaitu model kurikulum ini bisa jadi kurang terstruktur

atau kurang konsisten secara nasional jika tidak dikoordinasikan dengan baik.

Sistem pendidikan Islam mengisyaratkan untuk menekankan pada model implementasi kurikulum yang *integratif*, keduanya harus dikolaborasikan. Kurikulum pendidikan Islam mengamanatkan integrasi nilai, global ataupun lokal, lama ataupun baru. Firman Allah dalam al-Qur'an surah *al-Nisa* ayat (9) menjelaskan:

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا (النساء: ٩)

Artinya: *Dan orang-orang yang benar-benar takut pada Allah adalah orang-orang yang khawatir meninggalkan generasi di belakang mereka sebagai generasi yang lemah, maka bertakwalah kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar, (QS. Al-Nisa: 9).*

Kekuatan generasi di depan terdapat pada komitmen generasi hari ini untuk memegang teguh nilai yang diwariskan dari generasi sebelumnya (agama). Walaupun berada di tengah gempuran nilai global yang *hedonis* dan *materialistis*, generasi itu harus kuat memegang nilai lokal, nilai leluhurnya.

Prinsip pendidikan atau kurikulum fleksibel, sering dikorelasikan dengan landasan filsafat pendidikan Islam dan filsafat pendidikan Barat. Aan Rohanah pernah mensitir sebuah kalimat yang mengandung hikmah fleksibilitas dalam pendidikan, bahkan dinisbatkan pada Imam Ali bin Abi Thalib:

لا تودبوا أولادكم بأخلاقكم ، لأنهم خلقوا لزمان غير زمانكم

Artinya: *Jangan didik anak-anakmu dengan didikan yang pernah dilakukan kepadamu, karena mereka diciptakan untuk zaman yang berbeda dengan zaman kamu sekalian.*

Karenanya, orang tua tidak boleh memaksa anaknya untuk mengikuti tradisi pendidikan masa lalu yang sudah tidak sejalan, karena zaman sudah berubah dan berbeda:

لاتجبروا أولادكم على آثاركُم، فانهم مخلوقون لزمان غير زمانكم

Artinya: *“Jangan paksakan anak-anakmu mengikuti, karena mereka diciptakan untuk zaman yang berbeda dengan zaman kamu sekalian”*.¹⁸

Penisbatan sanad kalimat hikmah di atas kepada Imam Ali ra tidak terlalu

¹⁸ Aan Rohanah, 'Mendidik Anak Mampu Hidup Di Zamannya', 2025 <<https://chanelmuslim.com/ustazah/mendidik-anak-mampu-hidup-di-zamannya-1>>.

banyak mendapat dukungan dari para ulama. Sumber lain menjelaskan bahwa kata-kata hikmah di atas sejalan dengan ungkapan para filsuf Yunani, yaitu Socrates dan Plato yang pernah mengatakan bahwa '*Janganlah kalian memaksa anak-anak kalian mengikuti jejak/kebiasaan kalian, karena mereka diciptakan untuk zaman yang bukan zaman kalian*'. Penjelasan di atas pernah diisaratkan oleh Imam Ash-Syahrastani dalam kitabnya *al-Milal wa al-Nihal*, yang menerjemahkan ungkapan para filsuf di atas ke dalam bahasa Arab, yaitu:

لَا تُكْرِهُوا أَوْلَادَكُمْ عَلَى آثَارِكُمْ (أَوْ آدَابِكُمْ)، فَإِنَّهُمْ مَخْلُوقُونَ لِزَمَانٍ غَيْرِ زَمَانِكُمْ

Artinya: *Janganlah kalian memaksa anak-anak kalian untuk mengikuti jejak/kebiasaan kalian, karena sesungguhnya mereka diciptakan untuk zaman yang berbeda dengan zaman kalian.*¹⁹

Perlu bijak untuk mempresentasikan ungkapan di atas. Walaupun bukan hadits, para ulama dan pakar pendidikan Islam menyetujui bahwa isi dan maknanya benar secara makna kultural. Catatan penting dalam mempresentasikan ungkapan di atas, yaitu apa yang boleh berubah (variabel) dan apa yang harus tetap (konstan/tsabit). Apa yang boleh berubah adalah konsep *akhlaqikum* atau *adabikum*, yaitu sarana, metode, tradisi lokal ('urf), dan keterampilan hidup. Apa yang konstan/tsabit prinsip dasar agama dan nilai kebaikan universal (seperti tauhid, kejujuran, adil, kesopanan) tidak boleh berubah oleh zaman. Anak zaman, kapanpun tetap wajib diajarkan jujur dan tetap berbakti.

Maqolah di atas merekomendasikan agar kurikulum pendidikan Islam disusun secara *fleksibel* supaya sesuai dengan perkembangan zaman sekaligus perkembangan budaya. Kurikulum pendidikan Islam dituntut untuk mengkompromikan budaya lama dengan budaya baru, budaya global dengan kearifan lokal. Kurikulum pendidikan yang baik berupaya untuk menemukan keseimbangan pengetahuan global dan lokal (*al-tawazun*). Kearifan lokal dalam kurikulum pendidikan akan memberikan landasan yang kuat bagi identitas budaya, keseimbangan pengetahuan, serta dalam rangka menjawab kebutuhan masyarakat.

Implementasi kurikulum muadalah yang banyak diadopsi oleh beberapa

¹⁹ Abu al-Fath Muhammad bin Abdul Karim Asy-Syahrastani, *Al-Milal Wa An-Nihal* (Beirut: Darul Ma'rifah, 2015).

lembaga pendidikan Islam, terutama pesantren, penting untuk dikaji. Implementasi kurikulum muadalah di pesantren ini merupakan sesuatu yang baru dan unik. Selama ini, pemerintah memberlakukan model kurikulum administratif, yaitu kurikulum yang dibuat dan disusun menggunakan metode *top down*, di mana pemerintah yang merencanakan, mengimplementasikan sekaligus mengevaluasi sebuah kurikulum. Sekilas seperti terjadi inkonsistensi, di mana kurikulum muadalah meniscayakan pesantren menggunakan kurikulum berbasis kearifan lokal, baik internal ataupun eksternal.

Kurikulum muadalah yang berbasis pada kearifan lokal mempunyai semangat untuk menguatkan karakter religius dan kedisiplinan. Karakter religius mengakar pada pembiasaan yang telah menjadi tradisi pesantren, sedangkan kedisiplinan dikuatkan oleh inovasi pesantren untuk mengadopsi sistem pendidikan formal. Semangat ini penting dan sangat urgensi diperlukan dalam rangka mencapai tujuan pendidikan nasional. Perpres Nomor 87 tahun 2017 dan Permendikbud nomor 20 Tahun 2018 merupakan landasan regulasi pelaksanaan program Penguatan Pendidikan Karakter (PPK), yaitu program membentuk karakter melalui pendidikan. Kurikulum yang menjunjung tinggi akhlak mulia, nilai-nilai luhur, kearifan, dan budi pekerti.

Nilai-nilai di atas merupakan warisan budaya yang senantiasa dipelihara bangsa Indonesia yang terangkum dalam karakter Pancasila yang meliputi nilai religius, jujur, toleran, disiplin, bekerja keras, kreatif, mandiri, demokratis, rasa ingin tahu, semangat kebangsaan, cinta tanah air, menghargai prestasi, komunikatif, cinta damai, gemar membaca, peduli lingkungan, peduli sosial, dan bertanggung jawab. Untuk menginternalisasikan nilai-nilai kearifan lokal bangsa Indonesia di atas, pemerintah menganggap akan efektif manakala dilakukan melalui program implementasi kurikulum yang berbasis membentuk karakter, baik pada ruang lingkup intrakurikuler, kokurikuler, ataupun ekstrakurikuler.²⁰

Membentuk karakter religius dan kedisiplinan merupakan pilar fundamental dalam membentuk individu yang utuh, bertanggung jawab, dan berkontribusi positif bagi diri sendiri, keluarga, masyarakat, dan bahkan negara.

²⁰ Kementerian Hukum dan HAM RI, *Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2017 Tentang Penguatan Pendidikan Karakter* (Jakarta: Kemenkumham RI, 2017).

Karakter religius misalnya, dia merupakan fondasi moral dan etika, merupakan pengendali diri dan ketahanan mental, motivasi internal dan tujuan hidup, menjadi alat untuk mencapai harmoni sosial dan toleransi, serta benteng terhadap pengaruh negatif. Sedangkan kedisiplinan mempunyai fungsi sebagai kunci keberhasilan akademik dan profesional, pembentukan kebiasaan baik, kemampuan mengelola diri (*self-management*), peningkatan rasa percaya diri, menciptakan lingkungan yang tertib dan produktif.

Formalisasi sistem pendidikan pesantren melalui kurikulum muadalah menguatkan santri mengikuti aturan formal yang ditetapkan lembaga. Dalam hal religiusitas misalnya, santri seharusnya mengikuti waktu belajar dan praktek ibadah sebagaimana telah ditentukan pesantren. Ada *reward* dan *punishment* bagi santri yang taat dan tidak taat. Target belajar, waktu, serta ketentuan naik *marhalah* akan disesuaikan dengan hasil evaluasi belajar santri. Demikian pula terkait dengan kedisiplinan, santri harus mengikuti tata tertib formal yang telah ditentukan lembaga. Kedisiplinan akan menyeimbangkan pola kemandirian santri yang selama ini telah berjalan. Implementasi kurikulum muadalah mengupayakan pola asuh santri lebih terbimbing.

Membentuk karakter religius dan kedisiplinan seringkali berjalan beriringan dan saling menguatkan. Karakter religius memberikan alasan moral dan spiritual untuk bersikap disiplin, sementara kedisiplinan membantu individu untuk secara konsisten mempraktikkan nilai-nilai religius dalam kehidupan sehari-hari. Individu yang memiliki karakter keduanya akan menjadi pribadi yang berintegritas tinggi, bertanggung jawab dan dapat diandalkan, mampu beradaptasi dengan perubahan, menghormati orang lain dan aturan yang berlaku, memiliki tujuan hidup yang jelas dan semangat untuk mencapainya. Karenanya, penanaman dan membentuk karakter religius serta kedisiplinan sejak dini melalui pendidikan merupakan investasi jangka panjang untuk masa depan individu dan kemajuan bangsa.

Pesantren merupakan lembaga pendidikan yang kaya kearifan lokal dan membentuk pendidikan karakter. Output pendidikan pesantren mempunyai nilai rasa keberagaman yang tinggi dibanding output pendidikan lainnya.

Implementasi kurikulum pendidikan pesantren lebih diorientasikan pada *tafaqquh fiddin*, yaitu pemahaman dan pelaksanaan agama yang mendalam. Strategi pembelajaran pada pendidikan pesantren lebih menekankan pada kedisiplinan. Santri dibiasakan untuk melaksanakan aturan dan tata tertib pesantren secara disiplin, mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi.

Kehadiran program muadalah pada pesantren menjadi penguat kurikulum pesantren sebagai bagian dari kurikulum nasional. Program muadalah berbasis kearifan lokal menjembatani jurang pemutus kurikulum pesantren dengan kurikulum modern. Membentuk kurikulum pesantren melalui program muadalah memberi kontribusi terhadap output pendidikan yang diharapkan oleh tujuan pendidikan nasional. Kurikulum muadalah berbasis kearifan lokal pada pesantren, disamping mampu mewariskan berbagai ilmu pengetahuan Islam, yang paling berdampak pada kehidupan sosial adalah perannya dalam membentuk generasi yang berkarakter religius dan disiplin.

Implementasi kurikulum muadalah berbasis kearifan lokal dalam membentuk karakter religius dan kedisiplinan yang dilaksanakan pada pesantren akan lebih efektif karena dilakukan dengan cara meng-*upgrade* model *konvensional* ke dalam sistem kurikulum yang lebih sistematis dan relevan. Sistematis dalam arti ada tahap yang dilakukan secara sistemik mulai dari penentuan tujuan, pemilihan materi, penentuan strategi, serta evaluasi berkala. Relevan berarti kurikulum itu sejalan dengan tujuan pendidikan Islam, searah dengan tujuan pendidikan nasional, sesuai dengan kebutuhan masyarakat, seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Implementasi kurikulum muadalah berbasis kearifan lokal dalam membentuk karakter religius dan kedisiplinan pada pondok pesantren akan mempertimbangkan metode implementasi kurikulum modern.

Beberapa ahli pendidikan pernah menyampaikan rekomendasi ketika implementasi sebuah kurikulum dilakukan, yaitu harus mempertimbangkan landasan, prinsip dan peran kurikulum. At-Toumy al-Syaibany mengemukakan bahwa di antara landasan yang menjadi dasar pengembangan kurikulum itu adalah

landasan agama, landasan filsafat, landasan psikologi dan landasan sosial.²¹ Menurut al-Syaibany Agama merupakan muara dari landasan pendidikan. Dasar filsafat, psikologi ataupun sosial harus berdasarkan landasan agama. Ketika berbicara landasan filosofis, dasar filosofis pendidikan Islam menurut al-Syaibany harus berdasarkan filsafat pemikiran Islam. Menurutnya ada perbedaan prinsip filsafat Islam dengan filsafat buatan manusia pada umumnya, walaupun pada hal tertentu ada persamaannya.

Kurikulum pendidikan Islam menurut al-Syaibany tidak mengabaikan dasar psikologis. Dasar psikologis ini berhubungan dengan perkembangan murid, kematangan, bakat, intelektual, emosi, minat, dan sebagainya. Dasar psikologis ini menjadi landasan penyusunan tujuan kurikulum pendidikan Islam, isi kurikulum dan langkah-langkahnya. Seiring sejalan dengan pemikiran *progressif*, pendidikan Islam pun mempertimbangkan dasar sosial dalam proses pengembangan kurikulumnya. Landasan sosial mengharuskan kurikulum pendidikan Islam untuk mengkonfirmasi ciri-ciri perkembangan masyarakat, baik yang bersifat umum ataupun yang bersifat khusus. Ciri-ciri masyarakat tersebut meliputi budaya, pengetahuan, kepercayaan, nilai, keterampilan, cara hidup, adat dan tradisi, seni, dan lain sebagainya. Landasan sosial tersebut harus menjadi dasar pengembangan kurikulum, karena pendidikan khususnya pendidikan Islam itu tidak terjadi di awang-awang, tetapi pada masyarakat.

Di samping harus mempertimbangkan landasan dan dasar pendidikan sebagaimana dijelaskan pada alinea sebelumnya, kurikulum yang *progressif* pada saat ini harus pula mempertimbangkan beberapa prinsip. Al-Syaibany pun menawarkan beberapa prinsip kurikulum pendidikan Islam, diantaranya adalah kurikulum harus mempunyai relevansi dengan agama Islam, di mana falsafah, tujuan, kandungan, metode, cara harus berdasarkan pada agama dan akhlak Islam. Selanjutnya, kurikulum itu harus bersifat *universal* atau menyeluruh, seimbang, adanya keterkaitan antara bakat, minat, kemampuan, kebutuhan, fisik, sosial, termasuk di dalamnya pengetahuan, keterampilan, pengalaman dan sikap.

Prinsip kurikulum selanjutnya menurut al-Syaibany adalah terpeliharanya

²¹ Omar Mohammad al-Toumy Al-Syaibany, *Falsafah Pendidikan Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1997), 505-506.

perbedaan di antara anak didik, baik perbedaan bakat, minat, kebutuhan, dan lain sebagainya. Prinsip penting sebuah kurikulum pendidikan menurut Al-Syaibany adalah perkembangan dan perubahan, menurutnya Islam mengutuk keras sifat meniru (*taklid*) secara membabi buta dan membeku pada *status quo*. Dan prinsip selanjutnya adalah *integritas*, adanya keterkaitan semua mata pelajaran, pengalaman dan aktifitas yang terkandung dalam kurikulum serta kandungan kurikulum dengan kebutuhan murid dan masyarakat.²²

Ramayulis mensitir konsep yang ditawarkan oleh Zakiyah Darajat terkait dengan prinsip kurikulum pendidikan ini, yaitu prinsip *relevansi*, adalah kesesuaian kurikulum dengan lingkungan, kehidupan masa sekarang dan yang akan datang, serta relevansi dengan tuntutan pekerjaan. Zakiyah mengisyaratkan bahwa yang dimaksud relevansi kurikulum pendidikan adalah terkoneksinya kurikulum pendidikan dengan budaya global dan kearifan lokal. Pada umumnya, alumni pendidikan, baik pendidikan umum ataupun pendidikan Islam, mengabdikan di daerah asalnya, atau wilayah sekitarnya. Karenanya, integrasi kearifan lokal dalam kurikulum pendidikan sangat *urgen* dan signifikan untuk dilakukan.

Penjelasan Zakiyah selanjutnya adalah kurikulum ini harus pula disesuaikan dengan prinsip *efektifitas*, baik efektifitas mengajar oleh guru, ataupun efektifitas belajar murid. Prinsip *efisiensi* merupakan prinsip yang direkomendasikan pula oleh Zakiyah Darajat, baik efisiensi waktu, tenaga, ataupun biaya. Dan yang paling prinsip dari sekian prinsip yang ada adalah prinsip kurikulum *fleksibilitas*, yaitu kurikulum seharusnya memberikan ruang gerak dan memberi kebebasan untuk bertindak, baik terkait dengan hal yang berorientasi pada pemilihan program maupun yang berorientasi pada pengembangan program pengajaran.²³

Sebagaimana pernah dijelaskan di atas, kurikulum itu tidak mesti harus bersifat *kreatif*, *inovatif* saja. Kurikulum harus meramu peran *konservatif* dalam arti harus bisa mewariskan nilai dan budaya yang telah ada sejak lama yang positif (kearifan lokal), karena nilai dan hasil budaya *progressif* itu tidak selamanya positif, sebagian besar banyak yang bernilai negatif. Maka peran *kritik-*

²² Al-Syaibany *Falsafah Pendidikan Islam*, 523.

²³ Ramayulis, *Ilmu Pendidikan Islam* (Jakarta: Kalam Mulia, 2004).

evaluatif dalam pengembangan kurikulum terhadap nilai dan budaya modern pun perlu tetap dipegang oleh para pengelola kurikulum. Inilah prinsip yang harus dipegang dalam pengembangan kurikulum pendidikan Islam, sejalan dengan kaidah *al-muhafadhatu 'ala qodiimi al-sholih wal akhdzu min jadidi al-ashlah*.

Kandungan kurikulum pendidikan pada dasarnya adalah pewarisan nilai budaya lama yang layak dan harus diwariskan pada setiap generasi. Nilai budaya lama ini harus menjadi *magnetic force*, yaitu daya çekang agar perkembangan dan pertumbuhan anak didik itu tidak keblablasan terbawa arus zaman. Untuk mengantisipasi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, agar kurikulum sejalan dengan perkembangan zaman, kurikulum harus berperan *kreatif* agar murid mampu menangkapnya.

Kurikulum harus mampu mengembangkan potensi murid agar mampu *berinovasi* dan *bertransformasi*. Tetapi hasil dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta perkembangan budaya sejalan dengan perkembangan zaman ini tidak selamanya bermanfaat. Tidak sedikit efek dari perkembangan yang tidak terkontrol ini justru menjadikan generasi selanjutnya mengalami kerusakan mental, moral dan spiritual. Maka dalam hal ini, kurikulum harus berperan *kritik* dan *evaluatif* agar tidak keblablasan. Dalam bahasa Zamaksyari Dhofier adalah *wa al-akhdzu min jadidi al-nafi* (dalam mengambil hasil budaya modern itu harus yang dianggap lebih bermanfaat).²⁴

Banyak yang mengkategorikan bahwa pendidikan pesantren merupakan pendidikan terbaik. Selama ini, kurikulum pendidikan pesantren nyaris tidak pernah mengalami perubahan. Terlepas dari faktor dan latar belakangnya, fenomena keajegan kurikulum pendidikan pesantren karena dianggap bermuatan nilai-nilai yang sesuai dan sejalan dengan perkembangan zaman. Kurikulum pendidikan pesantren, walaupun masih tradisional, dari sisi materi dan strateginya sarat dengan nilai yang diterima masyarakat pada umumnya. Kurikulum pendidikan pesantren mempunyai kekhasan dan kearifan yang diterima sebagian besar masyarakat muslim.

Menteri Agama Suryadarma Ali di sela-sela kunjungan kerjanya pada

²⁴ Dhofier, *Tradisi Pesantren, Studi Pendangan Hidup Kyai Dan Visinya Mengenai Masa Depan Indonesia*, 45.

tahun 2013, pernah mengatakan bahwa kelebihan pendidikan pesantren karena mampu mendidik anak selama 24 jam sehari, yaitu mulai dari mau tidur sampai tidur kembali. Apalagi yang menjadi sumbernya adalah al-Qur'an dan al-Hadits yang mempunyai kandungan pesan yang sangat luar biasa. Tetapi walau demikian, dalam hal substansinya pesantren harus mengikuti perubahan, perbaikan, inovasi tanpa sedikit pun meninggalkan ajaran Islam.²⁵

Muhammad Harits, seorang penulis Indonesia pernah mengunggah konsep tentang kelebihan pesantren sebagai lembaga pendidikan yang mampu menyeimbangkan kebutuhan spiritual dan intelektual sekaligus dalam individu setiap anak manusia. Lembaga pendidikan pesantren mempunyai lingkungan yang mampu mengembangkan moral dan akhlak generasi bangsa, lingkungannya mendukung untuk belajar, dilihat dari sudut keilmuan pun sangat sempurna. Pondok pesantren mampu memenuhi kriteria dari Peraturan Presiden Nomor 87 tahun 2017 tentang Membentuk Karakter. Di pesantren, peserta didik belajar olah hati, olah rasa, olah pikir, dan olah raga.

Di pesantren telah terjadi kerjasama antara satuan pendidikan, keluarga, dan masyarakat dalam kegiatan Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM). Bahkan katanya, pondok pesantren adalah tempat menempuh pendidikan karakter yang menyerap nilai-nilai budaya asli masyarakat Indonesia, seperti gotong royong. Bahkan katanya, nilai dan karakter yang ditularkan pendidikan pesantren diidentifikasi bersumber dari agama, Pancasila, budaya dan tujuan pendidikan nasional. Pantas seandainya ada beberapa ilmuwan pendidikan yang mengatakan bahwa pendidikan pesantren merupakan lembaga pendidikan terbaik. Output pendidikan pesantren bukan hanya untung dalam hal spiritual, namun juga jiwa nasionalisme yang tinggi.²⁶

Sekurang-kurangnya ada delapan alasan utama mengapa harus belajar di pesantren. *Pertama*, di pesantren dilaksanakan pembentukan karakter yang kuat. Pembelajaran di pesantren sangat menekankan internalisasi nilai keislaman dan

²⁵ Suryadarma Ali, 'No Title', 2016 <<https://kemenag.go.id/nasional/menag-pesantren-lembaga-pendidikan-terbaik-mj9mqh>>.

²⁶ Muhammad Harits, 'Pesantren Sebagai Lembaga Pendidikan Terbaik Saat Ini', *Indonesiana*, 2022 <<https://www.indonesiana.id/read/160355/pesantren-sebagai-lembaga-pendidikan-terbaik-saat-ini>>.

akhlak yang tinggi. Santri belajar bagaimana menghormati orang tua, guru, orang yang lebih tua. Santri dibentuk menjadi orang yang sabar, rendah hati, tanggungjawab. *Kedua*, di pesantren dilaksanakan pendidikan agama yang kuat. Siswa mendapatkan pendidikan agama yang sangat kuat dan intensif, meliputi mata pelajaran fiqih, hadits, sejarah Islam, moral dan etika, sehingga siswa menjadi muslim yang taat dan mu'min yang mampu mengamalkan ajaran agama dengan benar.

Ketiga, pesantren mempunyai lingkungan yang kondusif. Ekosistem pesantren dikondisikan sebagai tempat belajar, lingkungannya tenang dan alami, siswa lebih fokus dalam beribadah dan belajar, terhindar dari hal-hal negatif dan memperkuat hal-hal positif. Lingkungan ini sangat membantu, terlebih banyak kalangan anak dan remaja yang sudah kecanduan dampak buruk dari penggunaan *gadget* yang sudah tidak bisa dikendalikan orang tua. *Keempat*, di pesantren dilakukan pembelajaran yang *intensif*. Di pesantren berlaku jadwal yang padat dan intensif, bukan hanya belajar mengajar, siswa diajarkan juga untuk banyak menghafal al-Qur'an dan memperdalam ilmu agama dan bahasa. Hal ini akan membantu mereka meningkatkan kemampuan akademik dan keislaman.

Kelima, sistem pendidikan pesantren mengajarkan kemandirian yang tinggi, mandiri dalam segala hal, seperti mencuci pakaian, memasak, membersihkan lingkungan. *Keenam*, dalam pondok pesantren tercipta persaudaraan yang erat, hidup bersama dalam satu lingkungan yang sama, ibadah, belajar dan menjalani aktifitas bersama. *Ketujuh*, di pesantren terjadi pengembangan potensi diri. Pesantren memberi kesempatan yang luas pada siswa untuk mengembangkan potensi diri melalui berbagai kegiatan ekstra, seperti kajian kitab, kerajinan tangan, olah raga. Siswa belajar mengeksplorasi bakat dan minatnya dan mereka dibantu memperluas pengetahuannya dan wawasan. *Kedelapan*, pesantren memberikan pengalaman hidup yang sangat berharga bagi siswa. Mereka diberikan pengalaman kemandirian, tanggungjawab dan nilai keislaman yang kuat.²⁷

Penjelasan di atas seolah mengarahkan pada asumsi bahwa kurikulum

²⁷ E-ujian, '8 Alasan Utama Mengapa Harus Sekolah Di Pondok Pesantren: E-Ujian', July 2023 <<https://e-ujian.id/8-alasan-utama-mengapa-harus-sekolah-di-pondok-pesantren/>>.

yang baik itu adalah kurikulum yang bersifat *integratif-kolaboratif*. Kearifan dan kekhasan pendidikan pesantren yang selama ini dianggap baik harus diberikan peluang untuk mewarnai perkembangan kurikulum di Indonesia. Karenanya, implementasi kurikulum muadalah yang berbasis kearifan lokal pesantren akan menghasilkan output pendidikan yang integral, relevan dan kontekstual. Selain itu, integrasi kearifan lokal dalam kurikulum muadalah di pesantren akan mendorong santri lebih terlibat dalam proses pembelajaran dan meningkatkan motivasi belajar yang tinggi.

Implementasi kurikulum muadalah berbasis kearifan lokal dalam membentuk karakter religius dan kedisiplinan pada pesantren menuntut pengelolaan lebih sistematis. Memperhatikan konsep manajemen kurikulum, maka implementasi kurikulum muadalah berbasis kearifan lokal dalam membentuk karakter religius dan kedisiplinan pada pesantren ini harus diawali dengan perencanaan yang matang, pengorganisasian, implementasi, dan penilaian. Dalam setiap tahap kegiatan implementasi kurikulum muadalah berbasis kearifan lokal dalam membentuk karakter religius dan kedisiplinan pada pesantren itu harus ada pengawasan atau *controlling*, misalnya ada supervisi, evaluasi, kemudian ada laporan.

Implementasi kurikulum muadalah berbasis kearifan lokal dalam membentuk karakter religius dan kedisiplinan pada pesantren yang berjalan sesuai dengan tahap sebagaimana yang telah dijelaskan, maka *image* pendidikan pesantren yang dulunya *eksklusif*, tidak akan ada lagi. Pendidikan pesantren akan lebih dikenal dan konvensional, dan terkoneksi dengan sistem pendidikan nasional. Implementasi kurikulum muadalah berbasis kearifan lokal dalam membentuk karakter religius dan kedisiplinan pada pesantren akan memperkaya kurikulum nasional. Peneliti yakin bahwa kurikulum muadalah berbasis kearifan lokal dalam membentuk karakter religius dan kedisiplinan ini akan *efektif* dan *efisien*, mengupgrade kualitas pendidikan pesantren, bahkan kualitas pendidikan nasional dan pembangunan sumber daya manusia pada umumnya. Penelitian ini akan membuktikan asumsi di atas, apakah implementasi kurikulum muadalah di pesantren berjalan dengan baik? Mampukah implementasi kurikulum muadalah

mengungkit kepercayaan dan pengakuan masyarakat? Karenanya, peneliti memandang bahwa penelitian tentang fenomena implementasi kurikulum muadalah pada pesantren ini urgens dan signifikans untuk dilaksanakan.

Kurikulum muadalah berbasis kearifan lokal dalam membentuk karakter religius dan kedisiplinan pada pesantren sekurang-kurangnya harus menyentuh elemen utamanya. Hasan Langgulung yang disitir Ramayulis menyebut ada empat elemen utama yang menjadi ciri kurikulum, yaitu:

1. Tujuan pendidikan yang ingin dicapai oleh kurikulum;

Secara hirarki, yang menjadi tujuan universal pendidikan Islam didasarkan pada landasan teologis, yaitu kitab suci al-Qur'an. Para ilmuwan Muslim sepakat bahwa tunjuan utama pendidikan Islam adalah menjadikan manusia selamat dan bahagia di dunia dan di akhirat. Sebagai *abdullah* dan *khalifatullah*, pendidikan Islam bertujuan meningkatkan potensi spiritual, intelektual, sosial, dan moral manusia. Dalam kontek nasional tujuan pendidikan adalah mewujudkan manusia Pancasila dan *rahmatan lil'alamiin*.

2. Pengetahuan (*knowledge*), yaitu ilmu-ilmu, data, aktivitas dan pengalaman yang membentuk kurikulum;

Pendidikan Islam mempunyai konsep bahwa semua ilmu bermuara kepada Allah Swt, pencipta alam semesta. Ilmu Pendidikan Islam tidak pernah mendikotomikan ilmu, adalah untuk kepentingan pengetahuan, dalam Islam ilmu dibagi menjadi *ilmu alamiyah* dan *ilmu diniyah*;

3. Metode dan cara mengajar serta bimbingan yang harus diikuti siswa untuk mendorong mereka ke arah yang dikehendaki;

Apapun metode dan caranya, pendidikan Islam ingin mewujudkan manusia yang bertaqwa. Pola pendidikan anak asuh selama dua puluh empat jam, banyak diadopsi oleh lembaga pendidikan bermutu;

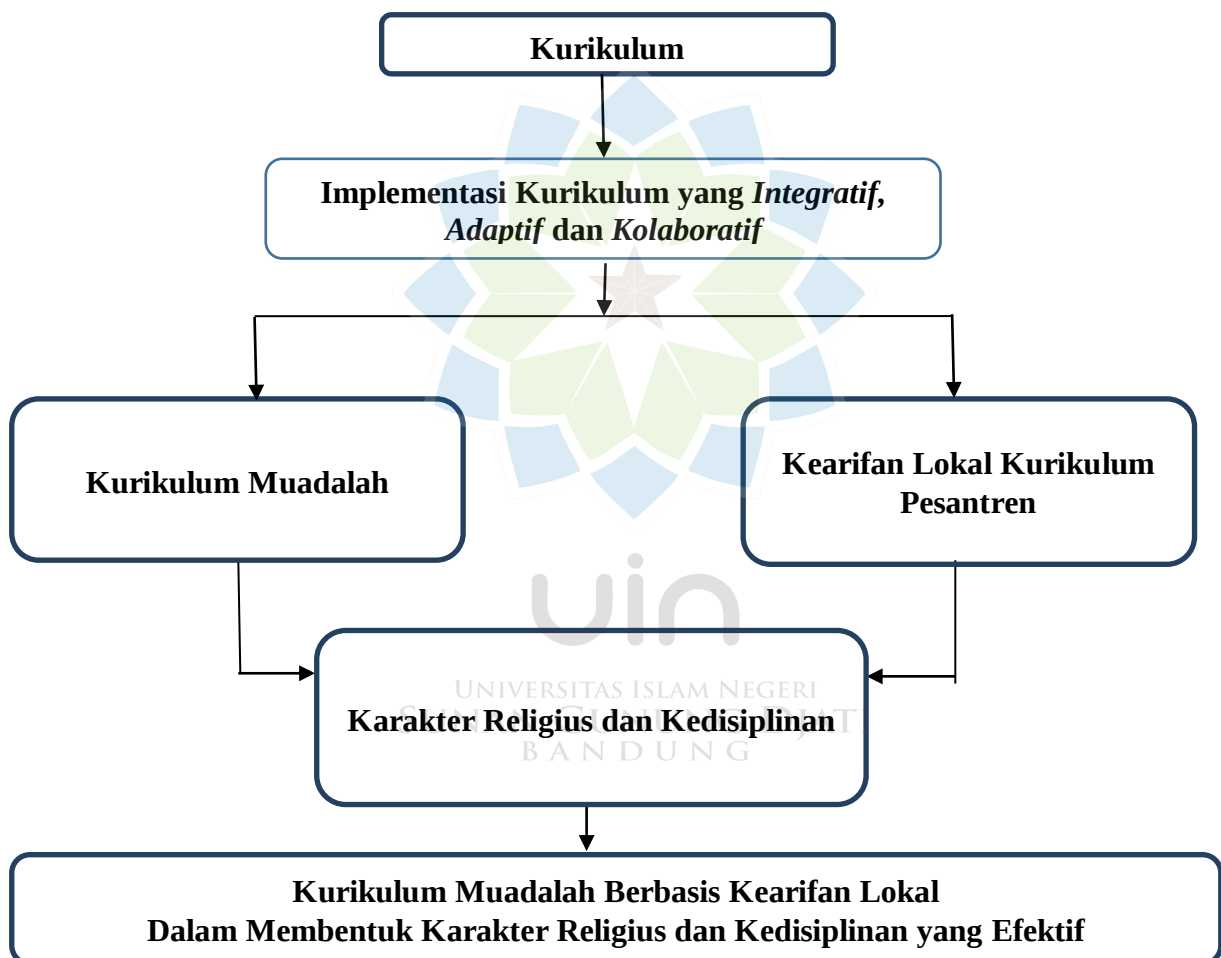
4. Metode dan cara penilaian yang digunakan dalam mengukur dan menilai proses pendidikan yang dirancang dalam kurikulum.²⁸

Kurikulum muadalah berbasis kearifan lokal dalam membentuk karakter religius dan kedisiplinan sebagaimana dijelaskan di atas, seyogyanya menjadi

²⁸ Ramayulis, *Ilmu Pendidikan Islam* (Jakarta: Kalam Mulia, 2004), 152.

solusi dari *eksklusifisme* pendidikan pesantren yang selama ini bersifat *konservatif* dan *tradisional*. Dalam bahasa lain, implementasi dari solusi di atas lebih populer dengan istilah *turuqul-jam'i*, yaitu memadukan dua hal yang berlainan dengan cara membuat irisan persamaan di antara keduanya. Alur kerangka pikir di atas, dapat diilustrasikan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 1.1
Implementasi Kurikulum Muadalah Berbasis Kearifan Lokal Dalam Membentuk Karakter Religius Dan Kedisiplinan



G. Hasil Penelitian Terdahulu

Penelitian ini penting dilakukan dalam rangka penelitian lanjutan, karena pernah ada peneliti sebelumnya yang meneliti pesantren muadalah, tetapi mayoritas masih bersifat umum dan belum menyentuh aspek kearifan lokal dan pembentukan karakter. Mushollin seorang dosen Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Pamekasan pernah meneliti terkait kurikulum pesantren berstatus muadalah Madrasah Aliyah Pondok Pesantren al-Salafy al-Fitrah Surabaya. Beliau melaporkan hasil penelitiannya bahwa arah Pendidikan dari pesantren al-Fitrah Surabaya di atas diaksentuasikan pada visi pesantren yaitu *menanamkan akhlak al-karimah atau budi pekerti yang mulia sejak dini sebagai bekal hidup dan kehidupan putera-puteri dalam melanjutkan perjuangan salafussalih untuk melestarikan dan mengembangkan suri teladan, bimbingan dan tuntunan dalam perjuangan dan hidup serta kehidupan baginda Habibillah Rasulillah Muhammad Saw yang penuh akhlakul karimah*.

Visi merupakan kondisi ideal yang diinginkan, sehingga visi yang diharapkan pesantren al-Fitrah Surabaya di atas merupakan tujuan secara institusional yang diidamkan lembaga pendidikan pesantren tersebut. Walaupun menggunakan kalimat yang kurang tepat untuk kalimat visi, yaitu “*menanamkan*” yang berfungsi sebagai kata kerja, tetapi tujuan lembaga pendidikan pesantren al-Fitrah telah jelas arahnya.

Adapun Langkah strategis yang digunakan untuk mencapai tujuan pendidikan institusional pesantren al-Fitrah tergambar pada beberapa misinya, yaitu:

1. Menyelenggarakan pengajaran/pendidikan formal atau nonformal yang berorientasi pada kelestarian dan pengembangan suri tauladan, bimbingan dan tuntunan dalam perjuangan dan hidup serta kehidupan baginda Habibillah Rasulillah Muhammad Saw;
2. Mempertahankan nilai-nilai salafussholih dan mengambil nilai-nilai baru yang positif dan lebih maslahah dalam kehidupan beragama dan bermasyarakat;
3. Membentuk pola pikir santri yang kritis, logis, objektif yang berlandaskan kejujuran dan akhlak al-karimah;
4. Memberikan bekal keterampilan hidup, membangun jiwa santri yang

mempunyai semangat hidup tinggi dan mandiri serta menghadapi tantangan perubahan zaman.

Visi dan misi pesantren sebagaimana dijelaskan di atas, paling tidak menggambarkan arah pendidikan pesantren yang hendak dicapai. Adapun alat untuk mencapai tujuan di atas menggunakan materi pembelajaran yang meliputi mata pelajaran agama dan mata pelajaran umum. Perbandingan mata pelajaran agama dan umum di pesantren al-Fitrah adalah 70 % mata pelajaran agama dan 30 % mata pelajaran umum sesuai dengan petunjuk teknis satuan pendidikan muadalah. Mata pelajaran agama meliputi ilmu tafsir, ilmu hadits, tauhid, akhlak, tarikh, fiqh, ushul fiqh, qawaidul fiqh, nahwu, shorof, qawaid al-i'rob, falak, faroid. Adapun mata pelajaran umumnya meliputi PPKN, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika, IPS.

Hasil penelitian yang dilakukan Mushollin di pesantren al-Fitrah Surabaya di atas, ditemukan konsep standar kompetensi masing-masing mata pelajaran secara sistematis. Standar kompetensi dimaksud ditemukan dalam pedoman yang telah disusun oleh team khusus di pesantren tersebut. Terkait dengan hal ini, pesantren al-Fitrah sudah mempunyai progress formalitas Lembaga pendidikan pesantrennya sesuai dengan tuntutan satuan pendidikan formal muadalah.

Hal yang tidak kalah pentingnya sebagai bahan informasi hasil penelitian terdahulu terkait kurikulum muadalah di pesantren al-Fitrah Surabaya adalah kegiatan dan metode pembelajaran. Dalam hal ini ditemukan konsep pembelajaran yang sepenuhnya merupakan khas pesantren, yaitu strategi pembelajaran *berangkat*, yaitu sebuah kegiatan yang berhubungan langsung dengan ubudiyah kepada Allah Swt, Rasulullah Saw, Shulthonul Auliyah Syeikh Abdul Qodir Jaelani, dan Hadrotus Syeikh KH Asyrori al-Ishaqi. Kegiatan ini dimaksudkan untuk menanamkan dan melatih tanggungjawab dan kejujuran hati.

Adapun kegiatan *berangkat* tersebut meliputi jama'ah maktubah dan sholat sunnah, membaca aurod yang telah dibimbingkan, qiroatul Qur'anil Karim, Bacaan Maulidur Rasul dan membaca manaqib Syeikh Abdul Qodir Jaelani. Kegiatan di atas merupakan kegiatan rutin pesantren yang tidak boleh dirubah oleh siapapun dan kapanpun. Di samping kegiatan di atas, ada kegiatan formal

lainnya yang dilakukan secara formal dan dikoordinir oleh Lembaga formal. Kegiatan-kegiatan di atas merupakan kegiatan rutin, bagian yang disengaja dan terdesain dari keseluruhan pola pendidikan, dikenal dengan konsep *integrated curriculum and activity*.²⁹

Abdullah Shodiq, seorang dosen STAI Pasuruan ketika melakukan penelitian untuk disertasinya, pernah mengobservasi proses pengembangan kurikulum pesantren muadalah pada *Madrasah Aliyah Pondok Pesantren Sidogiri dan Madrasah Aliyah Pondok Pesantren Salafiyah Pasuruan*. Hasil penelitiannya menemukan bahwa landasan pengembangan kurikulum muadalah kedua pesantren di atas dilakukan secara independen tetapi mengacu pada landasan filosofis, sosial budaya dan agama, pengembangan ilmu pengetahuan, kebutuhan dan perkembangan masyarakat.

Kemudian orientasi pengembangan kurikulum muadalah pada kedua pesantren di atas adalah memberikan pengakuan kesetaraan pendidikan lulusan pondok pesantren dengan lulusan dari lembaga pendidikan formal, yaitu Madrasah Aliyah. Kemudian selanjutnya pengembangan kurikulum muadalah kedua pesantren di atas dalam rangka memberikan kesempatan dan kemudahan pada lulusan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi disamping tetap untuk *tafaqquh fiddin yang berakhlakul karimah*.

Adapun model pengembangan kurikulumnya lebih menganut teori *administrative* dan *beauchan* yang berperspektif konvergensi, yaitu penggabungan tipologi *perenial esensialis salafi*, *perenial esensialis madzhabi*, dan tipologi *modernis*. Jelasnya, pengembangan kurikulum muadalah di kedua pesantren di atas berbasis kitab kuning dan kurikulum inti pendidikan nasional.

Adapun dampak dari pengembangan kurikulum muadalah pada kedua pesantren di atas menurut Mushoddiq adalah meningkatnya akses pesantren ke perguruan tinggi, sehingga proses peningkatan jenjang yang diinginkan oleh lulusan dengan memasuki perguruan tinggi tidak menemui kesulitan, minimal ke perguruan tinggi agama Islam. Demikian pula, dampaknya cukup signifikan pada

²⁹ Mushollin (Dosen STAIN Pamekasan), *Kurikulum Pondok Pesantren Muadalah* (Pamekasanemail_Ahmadmushollinyahoo.Com).

peningkatan minat dan popularitas pesantren, sehingga jumlah santri setiap tahun bertambah. Adapun dampak pada peningkatan kompetensi lulusan, disamping baertambahkan ilmu dan pengetahuan, tidak kalah penting bahwa lulusan kedua pesantren di atas lebih berkarakter agamis, dinamis, tolerans dan tidak fundamentalis.³⁰



³⁰ Abdullah Mushodiq, *Pengembangan Kurikulum Pesantren Muadalah, Studi Multisitus Madrasah Aliyah Pesantren Sidogiri Dan Madrasah Aliyah Pesantren Salafiyah Pasuruan* (Malang: Literasi Nusantara, 2020).